BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aluh-Aluh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Indonesia. Aluh-Aluh pada bagian utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin, pada bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, dan Beruntung Baru, pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut.

Penduduk di Kecamatan Aluh-Aluh berjumlah 2.0006 jiwa dengan luas wilayah 82,48 km² dan berjumlah 19 desa.

Batas-Batas Wilayah Kecamatan Aluh-Aluh:

Sebelah Utara	: Kota Banjarmasin
Sebelah Timur	: Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, dan Beruntung Baru
Sebelah Barat	: Kabupaten Barito Kuala
Sebelah Selatan	: Kabupaten Tanah Laut ⁸

⁸ Hasil Dokumentasi Dari Pegawai Kecamatan Aluh-Aluh Dibidang Pemerintahan.

Table 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Aluh-Aluh

NO	KODE	DESA/KELURAHAN	L	P	JLH
1	70655	ALUH-ALUH BESAR	1.727	1.683	3.410
2	70655	ALUH-ALUH KECIL	736	756	1.492
3	70655	ALUH-ALUH KECIL MUARA	577	552	1.129
4	70655	BAKAMBAT	728	716	1.449
5	70655	BALIMAU	336	297	633
6	70655	BUNIPAH	1.313	1.178	2.491
7	70655	HANDIL BARU	235	226	461
8	70655	HANDIL BUJUR	549	484	1.033
9	70655	KUIN BESAR	807	746	1.553
10	70655	KUIN KECIL	420	422	842
11	70655	LABAT MUARA	600	640	1.240
12	70655	PEMURUS	1.512	1.342	2.854
13	70655	PODOK	1.429	1.311	2.740
14	70655	PULANTAN	551	520	1.071

15	70655	SIMPANG WARGA	1.075	1.095	2.170
16	70655	SIMPANG WARGA DALAM	767	734	1.501
17	70655	SUNGAI MUSANG	673	776	1.449
18	70655	TANIPAH	335	328	663
19	70655	TERAPU	214	198	412
		JUMLAH	14.584	14.004	28.588

Dokumentasi: Kecamatan Aluh-Aluh

B. Penyajian Data

Persepsi masyarakat mengenai kejujuran di kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang akan penulis bahas yaitu meliputi 3 aspek penting mengenai kejujuran yaitu pengertian kejujuran, jumlah dan bentuk kejujuran, dan alasan penentuan kejujuran. Berdasarkan dari hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan para informan yang ada di beberapa desa kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar tentang persepsi masyarakat mengenai kejujuran, maka ada beberapa kasus yang dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Kasus 1

a. Identitas Responden (Ibu Mempelai Perempuan)⁹

Nama : Hj. Hasanah
Umur : 66 tahun
Pendidikan : Tamat SD/ sederajat
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Podok, RT. 01, RW. -, Kec. Aluh-
Aluh, Kab. Banjar

b. Uraian Kasus

Ibu Hj. Hasanah adalah ibu dari Ani yaitu pengantin perempuan yang baru saja telah menikah beberapa bulan yang lalu. Suami Hj. Hasanah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi putri beliau menikah tanpa adanya kehadiran sang ayah. Ani melangsungkan resepsi pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, dengan jumlah jujuran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰

Mengenai pengertian jujuran menurut ibu Hj. Hasanah jujuran adalah suatu pemberian dari pihak mempelai laki-laki

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kepada pihak mempelai perempuan yang berbeda dengan mahar. Kalau jujuran itu uang yang diserahkan pada jauh-jauh hari sebelum akad nikah, sedangkan mahar itu adalah uang yang diserahkan dan diucapkan pada saat akad nikah.¹¹

Jujuran anak ibu Hj. Hasanah yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang jujuran itu dibayarkan untuk sewa pelaminan. Pada awalnya ibu Hj. Hasanah ingin meminta jujuran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada calon menantunya, dan calon menantunya ini bekerja sebagai petani dan pada tahun itu panen padi mengalami kegagalan sehingga hanya sedikit sekali hasil padi yang didapatkannya, hanya cukup untuk makan sehari-hari, kemudian ibu Hj. Hasanah tidak jadi meminta jumlah jujuran tersebut dan pihak laki-laki mengatakan bahwa hanya ada uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan kepada pihak mempelai perempuan sebagai jujuran, kemudian ibu Hj. Hasanah menyetujui hal itu karena melihat dari keadaan calon mempelai laki-laki yang mengalami gagal panen ditahun itu. Kemudian ibu Hj. Hasanah menanyakan kepada anaknya dan

¹¹ *Ibid.*

anaknya menyetujuinya, dan ibu Hj. Hasanah pun merestui pernikahan mereka.¹²

Ani melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, kemudian jujuran diserahkan seminggu lebih dulu sebelum akad nikah dilangsungkan, dan bentuk jujurannya berupa uang yang dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki hanya untuk sewa pelaminan untuk kelangsungan pada hari resepsi, harga sewa pelaminan itu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). pada hari akad nikah Mahar yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).¹³

“Jadi saya hanya minta untuk biaya sewa pelaminan saja, jadi saya katakan bahwa untuk sewa pelaminannya itu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi pihak mempelai laki-laki mengatakan bisa menyanggupinya, jadi uangnya itu tidak diserahkan dengan saya tapi langsung saja dibayarkan untuk sewa pelaminan, dan saya sudah tidak memikirkan biaya itu lagi”.¹⁴

Alasan dalam penentuan jujuran ini karena Ani dan suaminya sudah atas dasar suka sama suka dan tidak ingin lagi melambat-lambatkan pernikahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan omongan tidak baik ditengah masyarakat karena mereka sudah kedekatan, kemudian ibu Hj. Hasanah

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

menyerahkan keputusan kepada Ani terkait lamaran itu, Ani tidak keberatan jika pernikahannya hanya diadakan secara sederhana, maka ibu Hj. Hasanah pun mau menerima lamaran tersebut dan menyetujui pernikahan anaknya. Maka dengan jujur tersebut pihak mempelai perempuan menerimanya dan mengadakan resepsi dengan sederhana.¹⁵

2. Kasus 2

a. Identitas Responden (Ibu Pengantin Perempuan)¹⁶

Nama : Hamidah

Umur : 35 tahun

Pendidikan : Tidak Tamat SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Desa Terapu, RT. 02, RW. -, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar

b. Uraian Kasus

Ibu Wahidah adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak perempuan yang pada beberapa bulan lalu

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahidah, *Wawancara Pribadi*, Desa Terapu, 17 Februari 2022.

telah mengadakan pernikahan. Anak ibu Wahidah bernama Aminah yang telah melaksanakan resepsi pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Jumlah jujurannya yaitu Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).¹⁷

Menurut Ibu Wahidah pengertian jujuran adalah suatu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berbeda dengan mahar. Kalau jujuran itu uang yang diserahkan sebelum akad nikah, sedangkan mahar itu adalah uang yang diserahkan dan diucapkan pada saat akad nikah. Menurut ibu Wahidah jujuran ini harus ada dalam suatu pernikahan, Jika tidak ada jujuran maka orang tua akan berpikir ribuan kali untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang melamar, dan artinya pernikahan tidak akan terjadi dan lamaran dari laki-laki itu akan ditolak. Jujuran sangat penting dalam sebuah pernikahan Karena ibu Wahidah menganggap itu bentuk bahwa seorang laki-laki menghargai dan menghormati seorang perempuan.¹⁸

“Kelewatan juga kalau laki-laki yang datang melamar anak saya kalau tidak ingin memberikan jujuran, padahal kalau diusahakan pasti bisa saja untuk memberikan jujura itun, yang penting jujurannya cukup untuk acara pernikahannya,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

sepertinya jika tanpa jujuran saya tidak mau menikahkan anak saya”.¹⁹

Jumlah jujuran anak Ibu Wahidah yaitu Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan bentuk jujuran anak dari ibu Wahidah ini yaitu berupa uang yang kemudian dibelikan untuk keperluan mempelai perempuan seperti baju, sepatu, tas, handuk, make up, alat sholat, dan lain sebagainya yang disebut dengan *penggiring*.²⁰

Aminah dengan suaminya melaksanakan akad nikah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, dengan mahar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). sedangkan jujurannya sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan penyerahan uang jujuran tersebut terhitung dua kali, pihak mempelai laki-laki menyerahkan uang jujuran itu kepada pihak mempelai perempuan pada akhir tahun 2020 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah. Uang itu dari hasil kerjanya yang ia kumpulkan. Kemudian 3 hari sebelum hari akad nikah pada tahun 2021 baru pihak mempelai laki-laki menyerahkan uang jujuran lagi sisanya yaitu 3.000.000 (tiga juta rupiah).²¹

Alasan dalam penentuan jujuran ini karena keluarga mempelai perempuan melihat dari mempelai laki-laki yang

¹⁹ Wahidah, *Wawancara Pribadi*, Desa Terapu, 17 Februari 2022.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya yang sudah tua dan sedang sakit, dan dari keluarga yang sederhana juga sama saja dengan mempelai perempuannya, jadi keluarga mempelai perempuan tidak meminta jumlah jujuran yang terlalu tinggi, yang terpenting jujuran itu ada dan bisa juga dipakai untuk menambah biaya pernikahan.²²

3. Kasus 3

a. Identitas Responden (Ayah Mempelai Perempuan)²³

Nama : H. Wahyudin, S.H

Umur : 47 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Anggota DPR

Agama : Islam

Alamat : Desa Bunipah, RT. 02, RW. 01, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar

b. Uraian Kasus

Bapak H. Wahyudin, S.H adalah salah satu anggota DPR di Kabupaten Banjar, anak beliau adalah perempuan yang

²² *Ibid.*

²³ Wahyudin, *Wawancara Via Telepon*, Desa Podok, 22 Februari 2022.

bernama Titania Aulia Wahyuni, S.M yang telah menikah dengan laki-laki yang bernama M. Rizqi Wahyudi, S.H yang baru saja kemarin mengadakan resepsi pernikahan pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022, dengan jumlah jujuran sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).²⁴

Pengertian jujuran menurut Bapak H. Wahyudin, S.H adalah suatu pemberian yang berbeda dengan mahar. Jujuran hanya pemberian/hadiah seikhlasnya yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu biaya pada acara resepsi pernikahan, jujuran ini pemberian yang tidak diwajibkan dalam Islam, namun beliau hanya mengikuti adat yang ada dimasyarakat. Jujuran berbeda dengan mahar, sedangkan pemberian mahar itu wajib, mahar ini pemberiannya khusus dan tersendiri untuk mempelai perempuan yang diserahkan dan diucapkan saat akad nikah. Sebenarnya beliau tidak sependapat dengan adanya jujuran ini namun karena adat dimasyarakat sudah melekat dengan adanya jujuran ini maka beliau pun mengikuti adat tersebut.²⁵

Jumlah jujuran anak beliau totalnya yaitu Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan bentuk jujuran yang diberikan pengantin laki-laki kepada putri beliau berupa

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

uang serta *Penggiring* seperti alat make up, pakaian, sepatu, tas, alat perlengkapan mandi, dan lain sebagainya.²⁶

“Jujuran itu hanya pemberian dan hanya adat saja, dan kami tidak sependapat dengan jujuran itu, namun jujuran itu hanya sekedar membantu saja, dari pihak laki-laki yang memberikan hadiah/bantuan untuk kelangsungan acara pernikahan, jadi berbeda dengan mahar. Mahar itu hukumnya wajib yang harus diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuannya, jadi pemberian itu khusus untuk pengantin perempuannya saja dan tidak boleh dibagi-bagi untuk keperluan pernikahan, dan mahar itu yang diucapkan ketika ijab qobul. Sedangkan jujuran itu adalah hadiah yang relatif, tergantung berapa keikhlasan dari mempelai pria untuk memberi. Bentuk jujuran putri beliau berupa perlengkapan wanita seperti handuk dan yang lain, kalau bahasa banjar itu disebut dengan *penggiring* seperti sandal, make up, dan lain sebagainya.”²⁷

Waktu pemberian jujuran pada hari yang sama pada hari akad nikah yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2021, waktu dilangsungkannya akad nikah pagi hari, kemudian setelah acara akad nikah berlangsung pada siang harinya baru uang jujuran diserahkan oleh pihak laki-laki secara langsung kepada pihak perempuan beserta dengan *penggiringnya*. Mahar yang diucapkan pada akad nikah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan jujuran yang diberikan sejumlah Rp.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) totalnya semua dengan penggiring.²⁸

Dari keluarga bapak H. Wahyudin tidak ada sama sekali meminta untuk jumlah jujuran putri beliau, jujuran yang bernilai cukup mahal tersebut sepenuhnya pemberian seikhlasnya dari pihak mempelai laki-laki, dan sebelum pemberian jujuran tersebut pihak mempelai perempuan juga tidak mengetahui jumlahnya, karena ketika pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan berapa untuk jumlah jujuran itu, pihak perempuan tidak mematok harga. Kemudian pada hari akad nikah pihak laki-laki memberikan jujuran sejumlah Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, dan pihak laki-laki mengatakan bahwa hanya bisa membantu untuk biaya pernikahan sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) saja. Uang jujuran tersebut digunakan untuk membantu berbagai biaya rangkaian acara pernikahan.²⁹

Alasan dalam pemberian jujuran tersebut adalah karena pihak mempelai laki-laki ingin membantu untuk keberlangsungan acara pernikahan seperti membeli

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

perlengkapan keperluan mempelai perempuan seperti sandal, sepatu, make up, dan lain sebagainya, serta untuk acara pernikahan dan resepsi. Jujuran itu sendiri hanya ditentukan oleh pihak mempelai laki-laki saja, yang ditentukan kedua belah pihak hanya mengenai tanggal pernikahan saja.³⁰

“Uang jujuran itu merupakan bantuan untuk acara pernikahan, dari biaya akad nikah sampai resepsi pernikahan itu biayanya kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah, uang jujuran itu juga dipakai untuk menambah biaya untuk acara pernikahan, tapi uang pribadi juga untuk biaya pernikahan itu, uang jujuran hanya untuk menambahkan saja untuk biaya itu.”³¹

4. Kasus 4

a. Identitas responden (Ayah Mempelai Perempuan)³²

Nama : Bahrudin

Umur : 40 tahun

Pendidikan : Tamat SD/ sederajat

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Baharudin, *Wawancara Pribadi*, Desa Podok, 23 Februari 2022.

Alamat : Desa Podok, RT. 03, RW. -, Kec. Aluh-
Aluh, Kab. Banjar

b. Uraian Kasus

Bapak Baharudin berasal dari suku bugis yang tinggal di desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh, bapak Baharudin mempunyai dua orang anak yaitu anak yang pertama perempuan dan anak yang kedua laki-laki. Kemudian anak perempuan bapak Baharudin yaitu Rahmawati telah menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari suku Bugis yaitu Idul Fitri Andika Prawitama yang tinggal di Sulawesi.³³

Menurut bapak Baharudin pengertian jujuran adalah sebuah hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Menurut bapak Baharudin Mahar dan jujuran itu sama saja karena sama sama merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.³⁴

Jumlah total jujuran anak beliau sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dan bentuk jujuran yang diberikan pihak mempelai laki-laki adalah berupa uang, cincin dan gelang emas, seperangkat alat sholat, pakaian

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

lengkap mempelai perempuan, alat mandi, make-up, dan selengkapnya. Sedangkan maharnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).³⁵

Resepsi pernikahan anak beliau terlaksana pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Sebelum resepsi pernikahan ada acara baantar jujuran yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2022 tanpa dihadiri oleh mempelai laki-laki karena sedang bekerja, yang kemudian diwakili oleh keluarga dari pihak mempelai laki-laki untuk penyerahan jujuran. Uang jujuran diserahkan dua hari sebelumnya sebelum acara baantar jujuran, agar mempelai perempuan bisa membeli penggiring untuk keperluannya, uang jujuran itu dikirim lewat bank yang kemudian ditarik oleh pihak mempelai perempuan juga melalui bank dengan buku tabungan lalu dibelikan mempelai perempuan untuk keperluannya seperti alat make up, baju, sepatu, sandal, handuk, lemari, dan lain sebagainya. Dan pada acara Baantar jujuran itu sebagai formalitas saja padahal sebenarnya uang jujuran telah diserahkan dua hari sebelum acara baantar jujuran itu.³⁶

“Dulu sebelum Rahmawati menikah dia tinggal dengan bibinya di Balik Papan, kemudian ketika calon mempelai laki-

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

laki menanyakan pada mempelai perempuan berapayang diminta untuk jumlah jujuran, lalu bibinya mengatakan seratus juta. Lalu bapak Baharudin merasa terlalu kebanyakan di kampung sini (desa Podok) kasihan calon mempelai laki-lakinya mencarikan uang sebanyak itu. Kalau di Balik papan itu memang biasa saja karena biaya hidup disana mahal, tapi kalau disini (desa Podok) biaya hidup tidak terlalu mahal dan bapak Baharudin merasa itu jumlah jujuran yang terlalu mahal, jadi bapak Baharudin hanya meminta setengah harga, yaitu lima puluh juta”.³⁷

Alasan dari penentuan jujuran ini adalah karena mempelai laki-laki menyanggupi untuk pemberian jujuran dengan jumlah tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan, jumlah jujuran tersebut pihak mempelai laki-laki juga yang ingin memberikannya tanpa ada rasa keberatan atau menjadi terbebani.³⁸

5. Kasus 5

a. Identitas Repsonden (Ayah Mempelai Perempuan)³⁹

Nama : Mahyuni

Umur : 45 tahun

Pendidikan : Tamat SD/ sederajat

Pekerjaan : Petani

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahyuni, *Wawancara Pribadi*, Desa Podok, 11 Maret 2022.

Agama : Islam

Alamat : Desa Podok, RT. 01, RW. -, Kec. Aluh-
Aluh, Kab. Banjar

b. Uraian Kasus

Bapak Mahyuni bekerja sebagai seorang petani di desa Podok, karena memang kebanyakan orang di kecamatan Aluh-Aluh profesi utamanya adalah sebagai petani. Bapak Mahyuni mempunyai anak perempuan yang bernama Yunita yang kemarin telah melaksanakan pernikahan.⁴⁰

Yunita melakukan akad nikah dengan Muhammad Fajri pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekaligus dengan acara *baantar jujuran*. Mahar Yunita ketika akad nikah yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jumlah jujurannya yaitu Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah dengan *penggiring* yang bernilai 2.000.000 (dua juta rupiah) dan totalnya menjadi 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). kemudian Resepsi pernikahannya pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021.⁴¹

Menurut bapak Mahyuni pengertian jujuran adalah suatu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

perempuan yang berbeda dengan mahar. Kalau jujuran itu uang serta *penggiring* yang diserahkan pada jauh-jauh hari sebelum akad nikah, sedangkan mahar itu adalah uang yang diserahkan dan diucapkan pada saat akad nikah.⁴²

Jumlah jujuran Yunita yaitu Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan bentuk jujuran Yunita berupa uang dan barang-barang perlengkapan perempuan lengkap seperti make-up, baju, sepatu, tas, seperangkat alat sholat, alat mandi, dan lain sebagainya. Jumlah jujuran tersebut di tentukan oleh pihak mempelai perempuan, dan pihak laki-laki pun menyetujuinya.⁴³

Alasan dalam penentuan jujuran ini karena bapak Mahyuni merasa semakin tahun harga barang semakin naik jadi sudah sepantasnya untuk menentukan jujuran Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dan ditengah masyarakat juga tidak terlalu berlebihan mematok jumlah jujuran tersebut karena jumlah jujuran tersebut juga sesuai dengan standar yang ada di desanya, dan bapak Mahyuni juga tidak mau jika jujuran anaknya murah/rendah karena bapak mahyuni hanya mempunyai satu-satunya anak perempuan. Biaya jujuran itu pun juga masih kurang sebenarnya untuk biaya pernikahan, dan untuk biaya

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

pernikahan bapak mahyuni menggunakan uang pribadinya dan juga sedikit dari uang jujuran.⁴⁴

“Untuk biaya pelaminan saja sudah memakan biaya 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membeli lemari, ranjang, dan kelambu senilai 5.000.000 (lima juta rupiah) jadi sisa uang jujuran tersebut sisa sedikit, untuk resepsi pernikahan bapa mahyuni memakai uang pribadi dan dari sisa uang jujuran”.⁴⁵

6. Informan

a. Identitas Informan (Tokoh Masyarakat)⁴⁶

Nama : Muhammad Arsyad

Umur : 65 tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Desa Podok, RT. 01, RW. -, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar

b. Hasil Wawancara

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Arsyad, *Wawancara Pribadi*, Desa Podok, 22 Februari 2022.

Bapak Muhammad Arsyad adalah seorang guru pengajar di pondok pesantren Darul Mubtadi'in di desa Podok, dan beliau juga seorang guru ngaji baik dikalangan anak muda sampai bapak-bapak karena kelimuan beliau tentang Al-Qur'an yang sangat baik. Beliau juga merupakan salah satu tokoh agama di desa Podok.⁴⁷

Menurut beliau pengertian jujur dan mahar itu sama saja dan pemberiannya merupakan suatu kewajiban. Mahar itu pada umumnya berupa benda berharga yang diberikan pada saat akad nikah yang diucapkan didepan penghulu, namun menurut beliau jujur itu sebenarnya juga mahar karena Jujur itu diberikan jauh jauh hari sebelum akad nikah dan telah diterima oleh pihak mempelai perempuan dan ada juga uang jujur itu dibelikan untuk keperluan mempelai perempuan, seharusnya jumlah uang jujur itu sama dengan mahar yang diucapkan pada saat akad nikah.⁴⁸

“Ada hadis Nabi yang artinya menjelaskan bahwasanya berikanlah mahar walaupun cincin dari besi, jadi dari hadis itu bisa disimpulkan bahwasanya mahar itu harus ada dalam pernikahan, dan bisa dikatakan wajib. Jadi apa saja mahar itu yang penting ada, namun lebih baik memberikan mahar yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

terbaik, berapa calon suami mempunyai uang maka dengan jumlah itu juga dia memberi mahar pada istrinya”.⁴⁹

Jumlah jujuran makin tahun sebenarnya tidak menentu juga yang ada di desa Podok ini, namun kebanyakan ditengah masyarakat makin tahun makin naik, dan bentuk jujuran yang ada ditengah masyarakat biasanya berupa uang, serta seperangkat alat sholat, make up, alat mandi, ranjang, lemari, sepatu, sandal, baju, hijab, dan lain sebagainya. Waktu pemberian jujuran biasanya seminggu atau dua minggu sebelum akad nikah dilangsungkan.⁵⁰

Alasan dalam penentuan jujuran yang sesuai hadis melihat perempuan berdasarkan empat perkara sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yaitu dilihat dari segi agamanya, nasabnya, kecantikannya, dan kekayaannya (hartanya).⁵¹

Dari dulu hingga sekarang memang kelihatan bahwa makin tahun jumlah jujuran semakin naik (mahal) karena menyesuaikan dengan zaman, nilai rupiah, dan harga pangan dan lain sebagainya yang juga semakin mahal. Pemberian jujuran itu baik jika mempelai laki-laki memberi sesuai kemampuannya saja dan tidak memberatkannya. Uang jujuran biasanya digunakan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

untuk keperluan mempelai wanita dan jika ada lebih maka bisa dipakai untuk membantu biaya pernikahan.⁵²

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Identitas Mempelai Perempuan	Pengertian Jujuran	Jumlah dan Bentuk Jujuran	Alasan Penentuan Jujuran
(Kasus 1) Ani 16 tahun Lulusan SD Tidak bekerja Desa Podok, RT. 01, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar	Suatu pemberian yang berbeda dengan mahar. Jujuran adalah uang yang diserahkan jauh-jauh hari sebelum akad nikah, sedangkan mahar adalah uang yang diserahkan dan diucapkan saat akad nikah.	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berupa sewa pelaminan.	Atas dasar suka sama suka dan ingin menyegerakan pernikahan anaknya agar tidak terjadi omongan tidak baik.
(Kasus 2)	Suatu pemberian yang berbeda dengan mahar. Jujuran adalah uang yang	Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), berupa uang serta	Kondisi calon mertua yang sedang sakit dan dari keluarga

⁵² *Ibid.*

<p>Aminah 16 tahun Lulusan SD Tidak bekerja Desa Terapu, RT. 02, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar</p>	<p>diserahkan jauh-jauh hari sebelum akad nikah, sedangkan mahar adalah uang yang diserahkan dan diucapkan saat akad nikah.</p>	<p><i>penggiring.</i></p>	<p>sederhana.</p>
<p>(Kasus 3) Titania Aulia Wahyuni 24 tahun Pascasarjana Mahasiswi Jl. Inpres Desa Bunipah, RT.02. Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar</p>	<p>Suatu pemberian yang berbeda dengan mahar. Jujuran adalah pemberian seikhlasnya dan tidak wajib, sedangkan mahar pemberian wajib dan khusus untuk calon mempelai perempuan.</p>	<p>Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), berupa uang serta <i>penggiring.</i></p>	<p>Keinginan pihak mempelai laki-laki meringankan beban biaya resepsi.</p>
<p>(Kasus 4) Rahmawati 21 Tahun</p>	<p>Sebuah pemberian yang sama dengan mahar. Karena sama-sama sebuah pemberian.</p>	<p>Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), berupa uang, cincin dan gelang emas, serta</p>	<p>Mempelai laki-laki menyanggupi untuk pemberian sejumlah jujuran dengan kesepakatan</p>

<p>Lulusan SMA Pegawai Swasta Desa Podok, RT. 03, RW. -, Kec. Aluh-Aluh, Kab.</p>		<p><i>penggiring.</i></p>	<p>kedua belah pihak.</p>
<p>(Kasus 5) Yunita 21 tahun Lulusan SMA Buruh perusahaan Plywod Desa Podok, RT. 01, Kec. Aluh- Aluh, Kab. Banjar.</p>	<p>Sebuah pemberian yang berbeda dengan mahar. Jujuran adalah uang yang diserahkan jauh-jauh hari sebelum akad nikah, sedangkan mahar adalah uang yang diserahkan dan diucapkan saat akad nikah.</p>	<p>Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), berupa uang serta <i>penggiring.</i></p>	<p>Berdasarkan harga barang yang semakin tahun semakin naik dan sesuai standar jujuran yang ada dimasyarakat.</p>

C. Analisis Data

Berkaitan dengan kasus-kasus yang telah penulis laporkan diatas maka ada 3 aspek penting yang akan penulis analisis yaitu:

1. Persepsi Masyarakat Mengenai Jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh

a. Pengertian *Jujuran*

Jujuran yang merupakan adat pada masyarakat suku Banjar yaitu berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk pihak mempelai perempuan sebagai suatu pemberian yang berbeda dengan mahar sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah. Uang jujuran ini biasanya digunakan untuk membeli keperluan calon mempelai perempuan, seperti untuk membeli lemari, ranjang, kasur, seperangkat alat sholat, peralatan mandi, baju, sepatu, tas, make-up, dan lainnya, serta untuk biaya resepsi.

Jujuran ini berbeda dengan mahar, *jujukan* merupakan adat yang ada pada suku Banjar yang selalu dilaksanakan masyarakatnya khususnya di kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar, sedangkan mahar adalah termasuk kedalam syarat sahnya pernikahan, jika tidak ada mahar maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Meskipun *jujukan* bukan termasuk syarat sah pernikahan seperti mahar, namun pada masyarakat Aluh-Aluh *jujukan* ini dianggap juga pemberian wajib disamping mahar.

Disetiap kasus yaitu kasus pertama, kedua, ketiga, dan kelima pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu masyarakat kecamatan Aluh-Aluh mempunyai persepsi bahwa *jujukan* itu suatu pemberian yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berbeda dengan mahar. Sedangkan pada

kasus keempat menganggap bahwa mahar dan jujuran adalah hal yang sama, yaitu sama-sama sebuah pemberian dalam pernikahan. Pemberian jujuran biasanya diberikan jauh-jauh hari sebelum akad nikah, sedangkan mahar adalah pemberian yang diserahkan dan diucapkan pada saat akad nikah. Uang jujuran biasanya berupa uang maupun barang yang kemudian uang jujuran itu digunakan untuk membeli keperluan mempelai perempuan dan juga untuk keberlangsungan acara pernikahan.

Persepsi masyarakat mengenai pengertian jujuran sudah sejalan dengan ajaran Islam dengan dasar ingin membantu untuk meringankan beban pihak calon mempelai perempuan untuk biaya resepsi nantinya dan untuk membeli perlengkapan calon mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang kepada calon istrinya.

Namun yang menjadi masalah adalah adanya patokan harga jujuran. Terdapat perbedaan pada beberapa kasus, ada yang mematok harga jujuran dari pihak mempelai perempuannya seperti pada kasus pertama, kedua, keempat dan kelima, namun ada juga yang tidak mematok harga jujuran sama sekali seperti kasus ketiga. Pada kasus pertama uang jujuran hanya digunakan untuk biaya sewa pelaminan saja, pada kasus kedua, ketiga, keempat dan kelima uang jujuran digunakan untuk membeli keperluan mempelai perempuan seperti tas, baju, alat sholat, emas, alat mandi, lemari, ranjang, kasur, sewa pelaminan, dan juga untuk acara resepsi.

Jujuran ini selalu ada dalam setiap pernikahan di masyarakat Aluh-Aluh yang bisa dikatakan sebagai hal wajib ditengah masyarakat, meskipun sebenarnya jujuran ini sebagian memberatkan pihak laki-laki jika pihak perempuan meminta jumlah jujuran yang diluar batas kemampuan dari pihak mempelai laki-laki. Namun jika pihak mempelai perempuan tidak meminta berapa jumlah jujuran kepada pihak laki-laki maka itu akan jauh lebih baik dan tidak memberatkan karena didalam Islam lebih menganjurkan kesederhanaan.

Berdasarkan kaidah fiqh yang mengatakan:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang telah menjadi ‘urf maka itu seperti syarat meski tidak terlafadzkan”

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”.⁵³

Kaidah ini berhubungan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah tentang adat kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan yang dilakukan dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruknya, sedangkan *'urf* digunakan dengan memandang

⁵³ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Pustaka al-Furqan, 2009), hlm. 114.

ada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak.⁵⁴

'Urf terdiri dari empat macam yaitu:

- a. *Al-'urf al-Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai Negara disatu masa. Contoh, adata yang berlaku di beberapa negeridalam memakai ungkapan untuk menjatuhkan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
- b. *Al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contoh, penggunaan kata “kendaraan” atau *himar* disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.
- c. *Al-'urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 388.

- d. *Al-'urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁵⁵

Suatu adat atau '*urf*' dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, juga tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menyebabkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan.

Penulis mengaitkan dari persepsi masyarakat mengenai kejujuran dengan *al-'urf al-Shahih* karena adat kejujuran sendiri tidak menyalahi hukum Islam dengan pengertian kejujuran yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan diluar mahar untuk membantu biaya resepsi pernikahan dan untuk membeli keperluan mempelai perempuan selengkapnya.

Namun disisi lain yang menjadikan kejujuran ini termasuk dalam *al-'urf al-Fasid* karena adanya patokan harga dari pihak mempelai perempuan yang mematok sejumlah kejujuran tertentu sesuai dengan standar kejujuran yang ada di desa mereka. Meskipun pihak mempelai laki-laki mampu, pemberian kejujuran harus berdasarkan pada kerelaan dari calon mempelai laki-laki, tidak seharusnya pihak mempelai perempuan mematok kejujuran tersebut, sebaiknya lebih mengutamakan pada pemberian pihak mempelai

⁵⁵ Satria Effendi, *loc. cit.*

laki-laki berapa ia mampu untuk memberikan jujuran dan lebih dianjurkan jujuran yang sederhana dan tidak memberatkan. Sedangkan pada beberapa kasus yang ditemui ditengah masyarakat Aluh-Aluh, ada beberapa masyarakat dari pihak mempelai perempuan yang meminta jumlah jujuran tertentu tanpa memikirkan pihak mempelai laki-laki. Seperti halnya pada kasus 1 pihak perempuan ingin meminta jujuran sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tetapi karena pada tahun itu panen padi gagal dan akhirnya jumlah jujuran yang disepakati yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada pada kasus 5 pihak perempuan meminta jujuran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai standar jujuran yang ada didesanya, maka pihak laki-laki menyetujuinya.

Seharusnya dengan adanya jujuran pihak laki-laki dianggap memberikan hadiah sebagai tanda untuk memuliakan dan menyenangkan hati calon istrinya dengan batas kemampuan calon suaminya, tapi pada faktanya dimasyarakat kecamatan Aluh-aluh rata-rata dari masyarakatnya pasti mematok harga untuk jumlah jujuran anak perempuannya tanpa melihat latar belakang dari calon mempelai laki-lakinya. Kebanyakan masyarakat lebih memikirkan agar terlihat jujuran dengan harga yang tinggi dan mahal.

b. Jumlah dan Bentuk *Jujuran*

Mengenai jumlah jujuran dari beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas sebelumnya ada berbagai macam jumlah jujuran yang ada di kecamatan Aluh-Aluh mulai dari paling rendah yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ada yang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), berupa uang serta *penggiring*, Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), berupa uang serta *penggiring*, Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), berupa uang, cincin dan gelang emas, serta *penggiring*, dan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), berupa uang serta *penggiring*.

Mengenai jumlah jujuran yang bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai. Pemberian jujuran bisa sejumlah uang, emas, atau barang keperluan mempelai perempuan. Adanya batas minimal ataupun standar jujuran, sebagaimana yang terdapat di beberapa desa dengan standar jujurannya masing-masing, dan masyarakat mengikuti standar jujuran tersebut, dan jika jujuran anak mereka lebih rendah dari standar yang ada dimasyarakat maka akan kurang dihargai dan malu, padahal tidak seharusnya mereka seperti itu karena pada dasarnya jika pihak mempelai perempuan meringankan dalam jumlah jujuran maka itu lebih baik untuk memudahkan pernikahan. Namun sebaliknya masyarakat yang mengikuti standar jujuran yang ada didesa mereka tidak berdasarkan sunnah dan tidak berdasarkan

keimanan serta ketaatan kepada Allah SWT, tetapi lebih cenderung kepada rasa gengsi, gaya hidup, dan materialistis. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran islam yang melarang umat islam untuk bersifat tercela seperti yang telah disebutkan sebelumnya, apalagi dalam masalah mahar atau jujuran yang disunahkann itu meringankan mahar, bukan untuk memberatkan pihak mempelai laki-laki hanya untuk memenuhi rasa gengsi dan lain sebagainya.

Bentuk jujuran yang ada di kecamatan Aluh-Aluh dari beberapa kasus kurang lebihnya sama saja yaitu berupa uang atau emas. Dari analisis penulis bahwasanya bentuk jujuran yang diberikan sesuai dengan ketentuan mahar yang ada didalam hukum islam yaitu berupa benda yang berharga. Meskipun sebenarnya jujuran berbeda dengan mahar.

2. Alasan Dalam Penentuan Jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh

Pada masyarakat Banjar tidak asing lagi dengan adanya adat istiadat yang melekat pada masyarakatnya, khususnya di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang masih menjaga adat istiadatnya, salah satunya jujuran.

Jujuran yang berbeda dengan mahar tujuannya tidak lain hanyalah untuk memuliakan dan meyenangkan hati sang calon istri, dan merupakan pemberian suka rela berdasarkan kemampuan sang calon suami. Namun, jujuran ini sedikit berbeda, jujuran ini ada yang

pemberian suka rela saja dan ada juga yang kesannya lebih memaksakan kehendak agar jumlahnya sesuai dengan kehendak pihak mempelai perempuan agar sesuai juga dengan jumlah jujuran yang ada ditengah masyarakat.

Alasan dalam penentuan jujuran yang ada dimasyarakat Aluh-aluh berbeda-beda, pada kasus pertama alasan dalam penentuan jujurannya karena sudah atas dasar suka sama suka antara calon mempelai perempuan dan laki-lakinya, jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik dinikahkan meskipun jujuran yang diberikan pihak mempelai laki-laki tidak seperti yang diinginkan ibu mempelai perempuan. Namun karena jumlah jujuran yang terlalu rendah dari jumlah standar jujuran yang ada dimasyarakat desa Podok dari Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), timbul dugaan ditengah masyarakat bahwa mempelai perempuan telah hamil duluan sehingga jumlah *jujurannya* hanya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja, karena masyarakat berpendapat bahwa jika orang tua tidak menyetujui dengan jumlah jujuran tersebut maka orang tua akan malu jika anaknya tidak dinikahi dalam keadaan tersebut. Sebelum menikah memang calon kedua mempelai mempunyai hubungan dan sering kemana-mana sehingga masyarakat berasumsi bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil duluan dan ditambah lagi jumlah jujuran yang jauh dari standar dimasyarakat desa Podok.

Padahal maksud dari ibu Hj. Hasanah disini baik untuk menikahkan anaknya dengan jumlah jujuran yang tidak memberatkan calon menantunya agar anaknya bisa menikah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, daripada ibu Hj. Hasanah tetap memaksakan kehendaknya dengan jujuran yang awal dipatoknya yaitu Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun perkawinan anaknya ditunda sampai tahun depan menunggu panen padi selanjutnya dan juga tidak tahu apakah panen padi tahun berikutnya bisa berhasil atau gagal, sehingga ibu Hj. Hasanah lebih memilih mengalah dengan menerima jumlah jujuran yang diberikan calon menantunya dengan semampunya saja dan seadanya karena memikirkan anaknya yang sudah sangat ingin menikah pada waktu itu dan juga tidak keberatan dengan acara pernikahan yang sederhana dengan uang yang seadanya.

Dari kasus pertama ini penulis mengaitkan dengan pendapat Usman dalam bukunya Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, bahwa adat itu dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ini:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.

- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- d. Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwa yang sejahtera.⁵⁶

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jujuran anak perempuan Ibu Hj. Hasanah tidak bertentangan dengan syarat-syarat tersebut dan sejalan dengan hukum islam.

Pada kasus kedua pihak mempelai perempuan menerima jumlah jujuran sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan pembayaran dua kali, yaitu pertama dibayar pada akhir tahun 2020 sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) karena ditakutkan jika tidak diserahkan kepada pihak perempuan maka uang jujuran itu akan habis dan digunakakan untuk keperluan lain maka calon mempelai laki-laki menyerahkan uang jujuran tersebut kepada pihak calon mempelai perempuan. Kemudian pada tahun 2021 baru diserahkan lagi oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sisa dari uang jujuran tersebut yaitu Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), penyerahan uang tersebut diserahkan tiga hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Dari kasus kedua ini penulis menganalisis pembayaran jujuran dengan dua kali bayar ini atau bisa disebut juga dengan terhutang dengan pembayaran mahar yang terhutang. Ulama sepakat bahwa pembayaran mahar boleh secara kontan maupun hutang, tergantung pada kemampuan dan keadaan calon pasangan yang akan menikah. Namun terdapat

⁵⁶ Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, *loc.cit.*

perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang pembatasan waktu untuk pembayaran mahar yang terhutang.⁵⁷

Menurut Imam Malik, apabila penangguhan mahar itu disebutkan dengan tempo yang telah ditetapkan seperti lima hari atau tujuh hari, diperbolehkan penangguhan pada waktu tersebut, namun jika sudah lewat dari batas perjanjian waktu penangguhan yang telah disepakati, sedangkan mahar tersebut belum juga dibayar atau dilunasi maka penangguhan tersebut tidak diperbolehkan. Menurut Imam Hanafi, mahar yang tertunda meskipun semuanya atau sebagian tetap sah, walau jatuh tempo pembayarannya cepat atau lama, sampai bercerai atau mati. Menurut Imam Syafi'i, penundaan pembayaran mahar tidak boleh kalau tidak ada kesepakatan dari calon istri atau walinya, kalau istri tidak menyetujui penundaan pembayaran mahar tersebut maka calon suami wajib membayar mahar pada saat itu juga. Sedangkan menurut Imam Hambali, boleh ditunda pembayaran (sebagian) sampai batas perjanjian yang ditentukan, dan apabila sudah sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan mahar belum dibayar maka tidak boleh penundaan. Jika tidak ditentukan batas waktu penundaan maka Imam Hambali berpendapat maharnya sah.⁵⁸

⁵⁷ Nur Aisah, "Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap Pasangan Nkah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan batang Angkola", *Skripsi*, Padangsidempuan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, 2012, hlm. 24.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 24-25.

Dari berbagai pendapat para fuqaha mengenai mahar yang terhutang tersebut dan dengan batas waktu yang telah disepakati maupun batas waktu yang tidak ditentukan batasnya, pada dasarnya mahar yang terhutang itu diperbolehkan dan yang menjadi perbedaan pendapat para fuqaha hanya pada waktu pembayarannya. Jadi dapat dipahami bahwa mahar diperbolehkan untuk berhutang namun sebaiknya memang harus dibayar kontan. Dari pendapat tersebut penulis menganalisis bahwasanya *jujuran* juga tidak dipermasalahkan untuk pembayarannya terhutang, dimasyarakat Kecamatan Aluh-Aluh juga tidak ada aturan adat yang mengatakan bahwa pembayaran *jujuran* tidak boleh berhutang. Namun pembayaran *jujuran* secara hutang ini sangat jarang sekali ada pada masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh jadi masyarakat menganggap hal ini asing, namun masyarakat tidak mempermasalahkan masalah ini.

Pada kasus ketiga pihak mempelai perempuan sama sekali tidak mematok harga *jujuran*, padahal dari semua kasus yang penulis temukan dilapangan pada kasus ketiga ini adalah jumlah *jujuran* yang paling tinggi/mahal, namun pemberian *jujuran* ini murni hanya pemberian seikhlasnya dari pihak mempelai laki-laki dengan tujuan untuk membantu biaya pernikahan, tanpa ada maksud dan tujuan lain atau pun patokan harga *jujuran* yang diberikan pihak mempelai perempuan. Pada kasus ini sama sekali tidak ada rasa keberatan dari pihak laki-laki dikarenakan pemberian *jujuran* ini lebih mengutamakan pemberian dengan dasar kerelaan dari pihak mempelai laki-laki.

Pada kasus keempat pihak mempelai perempuan memang mematok harga untuk jumlah jujuran, namun yang pertama kali mematok harga jujuran adalah bibinya dengan jumlah jujuran Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai standar jujuran di kota Balik Papan tempat tinggal bibinya karena sebelumnya mempelai perempuan ikut dengan bibinya tinggal disana, kemudian setelah dirundingkan dari keluarga pihak perempuan untuk jumlah jujuran diputuskan oleh ayah dari mempelai perempuan bahwa jumlah jujurannya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena bapak Baharudin ayah dari mempelai perempuan menganggap bahwa jumlah jujuran yang pertama yaitu Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) itu terlalu mahal juga di desa Podok dan pihak mempelai laki-laki juga perlu waktu lagi untuk mencukupkan uang jujuran yang diminta tersebut, jadi bapak Baharudin memutuskan untuk jujurannya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) agar tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk pihak laki-laki mengumpulkan uangnya agar pernikahan bisa segera dilaksanakan. Bapak Baharudin juga menganggap jujuran anaknya di desa Podok sudah lebih tinggi dari yang lain. Memang ada patokan harga dari pihak mempelai perempuan namun jumlah jujuran yang dipatok itu sesuai saja dengan kemampuan mempelai laki-laki dimana tidak ada memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Meskipun harga yang dipatok sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki namun sebaiknya dari pihak mempelai perempuan

tidak mematok harga, dan lebih mengutamakan pemberian dengan dasar kerelaan saja dari pihak mempelai laki-laki.

Selanjutnya pada kasus kelima, ayah pihak mempelai perempuan mematok harga sesuai dengan standar jujuran yang ada ditengah masyarakat desa Podok, jumlah jujurannya yaitu Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Karena bapak Wahyuni hanya mempunyai anak perempuan satu-satunya maka beliau ingin jumlah jujuran yang tinggi dan sesuai dengan standar jujuran yang dimasyarakat desa Podok, dan beliau juga menginginkan pernikahan yang terbaik untuk anaknya meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Bapak Wahyuni menganggap bahwa jujuran yang beliau patok wajar saja sejumlah itu, karena orang lain juga menyanggupi dengan jumlah jujuran tersebut, jadi bapak Wahyuni juga menganggap bahwa calon menantunya juga harus menyanggupi jumlah jujuran tersebut. Padahal seharusnya tidak boleh menyamakan dengan orang lain tersebut karena taraf ekonomi setiap mempelai laki-laki yang melamar itu berbeda-beda dan juga dari latar belakang keluarga yang berbeda, ada dari keluarga yang berada dan tidak berada. Tapi pihak mempelai laki-laki menyanggupi untuk memberikan sejumlah jujuran tersebut dan akhirnya pernikahan mereka terjadi.

Dalam Islam dikenal prinsip *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan) dalam segala urusan terlebih lagi dalam perkawinan yang tujuannya adalah ibadah. Pihak perempuan tidak diperkenankan meminta yang justru memberatkan pihak laki-laki, karena hal ini akan

menimbulkan dampak negatif seperti penghambat pernikahan, berhutang demi mendapatkan uang yang diminta, kawin lari, perempuan yang menjadi perawan tua, dan perzinahan.⁵⁹

⁵⁹ Gusti Muzainah, *op. cit.*, hlm. 27.